

Analisis Pemahaman Penyelenggara Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap Penyusunan Rencana Tata Ruang

Analysis of the understanding of Government Organizers Within the North Sumatra Provincial Government on the Preparation of Spatial Plans

Tommy Clinton Marpaung

Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Sekolah Pascasarjana,
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 11 Juli 2024; Direview: 28 Juli 2024; Disetujui: 26 Agustus 2024
Coessponding Email: tommymarpaung95@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman penyelenggara pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Utara khususnya dalam penyusunan rencana tata ruang. Analisis pemahaman yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis pengukuran pemahaman sebagai pusat analisis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode angket dan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini mengangkat pertanyaan penelitian "Mengapa kondisi Penyelenggara Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sumatera Utara masih berada dalam kondisi perizinan dan peraturan yang tumpang tindih sehingga terjadi berbagai masalah kompleks pada di berbagai daerah di Sumatera Utara?" Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan menggunakan tujuh indikator pada teori pengukuran pemahaman menurut Anderson dan Krathwol tahun 2010. Melihat kondisi yang terjadi dari angket yang disebarkan ke beberapa narasumber menunjukkan data adanya hasil analisis berbeda-beda dari tujuh indikator pengukuran pemahaman pada penyelenggara pemerintah rencana tata ruang provinsi Sumatera Utara, sehingga menjadikan perencanaan tata ruang di provinsi Sumatera Utara masih memiliki masalah yang kompleks serta masih tumpang tindihnya masalah perizinan.

Kata Kunci: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; Perencanaan Tata Ruang; Pengukuran Pemahaman; Penyelenggara Pemerintah

Abstract

This article aims to analyze the understanding of government officials within the North Sumatra provincial government, especially in preparing spatial plans. The analysis of understanding carried out in this study uses understanding measurement analysis as the center of analysis. This research uses data collection techniques with the questionnaire method and uses two types of data, namely primary data and secondary data. This research raises the research question "Why is the condition of the Spatial and Regional Planning Organizer of North Sumatra Province still in the condition of licensing and overlapping regulations resulting in various complex problems in various regions in North Sumatra?" The question will be answered using seven indicators on the theory of measuring understanding according to Anderson and Krathwol in 2010. Seeing the conditions that occur from the questionnaire distributed to several sources shows data on the existence of different analysis results from seven indicators of understanding measurement on government organizers of the North Sumatra provincial spatial plan, thus making spatial planning in North Sumatra province still has complex problems and still overlapping licensing problems.

Keywords: North Sumatra Provincial Government; Spatial Planning; Measurement of Understanding; Government Organizers; Seven Indicators.

How to Cite: Marpaung, T.C., (2024), Analisis Pemahaman Penyelenggara Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap Penyusunan Rencana Tata Ruang, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 7 (1): 274-281.



PENDAHULUAN

Penataan tata ruang merupakan suatu sistem yang disediakan oleh pemerintah dalam hal perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Ridwan, 2023). Dalam penataan tata ruang juga tidak luput dari banyaknya masalah yang terjadi termasuk di Indonesia. Permasalahan Tata Ruang di beberapa provinsi di Indonesia menjadi masalah yang sulit untuk diselesaikan. Hal ini terbukti dari survei *Rethinking the Future* yang menyebutkan bahwa Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan tata kota terburuk di dunia. Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor seperti adanya keterbatasan anggaran, kerap terjadi benturan kepentingan antar beberapa pihak, berbagai masalah rumit dan berulang terjadi, kesenjangan kepadatan penduduk di kota, dan lainnya (Makki, 2021). Permasalahan ini yang menjadi tantangan bagi pemerintah dan jajaran stakeholder dalam menata kota dan wilayah agar dapat menciptakan kota yang nyaman dan layak huni.

Fenomena Tata Ruang dan Wilayah di Sumatera Utara juga menjadi persoalan serius. Salah satu organisasi nasional bernama Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) melaporkan bahwa pembangunan berbagai daerah di Sumatera Utara banyak melanggar berbagai peraturan tata ruang (Wibisono, 2015). Permasalahan ini juga diperparah dengan tidak terintegrasinya sistem pengurusan izin tata ruang sehingga kebijakan yang diambil sering tumpang tindih. Permasalahan ini menjadikan kinerja pemerintah Sumatera Utara menjadi tidak efektif dan efisien. Penelitian Kusumaningrat, Subiyanto, & Yuwono (2017) menguji perubahan dan penggunaan dan pemanfaatan lahan di sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang berlaku di Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Perubahan pemanfaatan lahan mendapatkan hasil, kegiatan ekonomi mengalami penurunan sebesar 1275,9 hektar, kegiatan sosial mengalami peningkatan sebesar 91,41 hektar, pemanfaatan tempat tinggal naik 1363,16 hektar dan klasifikasi tidak ada pemanfaatan turun sebesar 210,61. Perubahan kesesuaian lahan selama kurun waktu 8 tahun mengalami peningkatan sebesar 1291,19 hektar atau 1,18%.

Dalam konteks Provinsi Sumatera Utara, Kajian dan penelitian Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di Provinsi Sumatera Utara telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sitorus, Bejo, & Muzambiq (2021) menyebutkan bahwa tata letak dan struktur tanah di kecamatan berastagi rawan longsor. Kondisi alami ini diperparah dengan pembangunan pemukiman liar dan hotel yang tidak sesuai dengan analisis dampak lingkungan. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indonesia, 1999). Pada lingkup daerah, unsur penyelenggara pemerintahan daerah terdiri dari gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah (Kusuma, 2014). Penyelenggara pemerintah menjadi menarik untuk dijadikan objek penelitian karena sebagai pembuat kebijakan dalam ruang lingkup Provinsi Sumatera Utara.

Pemberian contoh aplikatif terhadap sebuah aturan (*exemplifying*), kemampuan mengklasifikasi aturan (*classifying*), kemampuan meringkas aturan (*summarizing*), menarik inferensi aturan (*inferring*), membandingkan dengan aturan lainnya (*comparing*), Menjelaskan aturan (*explaining*). Setelah analisis terjabarkan, maka hasil dari penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi ke berbagai penyelenggaraan negara dan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu, melihat fakta empiris dan fakta teoritik tersebut penelitian ini mengangkat pertanyaan penelitian: "Mengapa kondisi Penyelenggara Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sumatera Utara masih berada dalam kondisi perizinan dan peraturan yang tumpang tindih sehingga terjadi berbagai masalah kompleks pada di berbagai daerah di Sumatera Utara?"



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Sugiyono, 2009). Bersamaan dengan jenis penelitian tersebut, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dalam bentuk administratif. Suharsimi di tahun 1993 menjelaskan bahwa studi adalah salah satu pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan banyak (Arikunto, 1993). Untuk melengkapi penelitian ini, penulis juga menggunakan berupa angket (kuesioner) untuk mengumpulkan data-data. Kuesioner (angket) merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder yang digunakan sesuai dan signifikan terkait dengan topik penelitian.

Untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman penyelenggara negara atas penyusunan aturan Tata Ruang di Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini menggunakan pengumpulan data adalah data angket atau kuesioner. Untuk alternatif jawaban dalam angket ini ditetapkan skor yang diberikan untuk masing-masing pilihan dengan menggunakan modifikasi skala likert. Skala likert merupakan bagian dari skala pengukuran dalam penelitian. Skala likert adalah bagian dari sebuah skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner dan merupakan skala pengukuran yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Skala likert terbagi atas dua bentuk pertanyaan yang menentukan pengukuran, yaitu pengukuran positif dan pengukuran negatif. Dan pada penelitian ini, skala likert akan menentukan penjelasan sangat tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah. Dengan demikian dalam penelitian ini responden dalam menjawab pertanyaan hanya ada 4 kategori diantaranya sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS), dari jawaban di atas memiliki bobot skor dengan rincian sebagai berikut:

Pertanyaan	Skor
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Adapun rumus dalam menentukan rentang skala (RS) adalah sebagai berikut:

$$RS = \frac{m - n}{b}$$

- RS = Rentang Skala
 n = angka terendah dalam kuesioner
 m = angka tertinggi dalam kuesioner
 b = banyaknya pilihan jawaban dalam kuesioner

Dalam penelitian tesis ini, adapun rentang skala = 24, maka untuk menginterpretasikan rata-rata penilaian dalam melihat pengukuran adalah sebagai berikut:

Hasil Penentuan Rentang Skala	Keterangan
Nilai skor antara 108 – 132	Sangat Tinggi
Nilai skor antara 83 – 107	Tinggi
Nilai skor antara 58 – 82	Rendah
Nilai skor antara 33 – 57	Sangat Rendah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menganalisis hasil dari angket yang telah diisi oleh responden terhadap tujuh indikator pengukuran pemahaman, yang diantaranya ialah menafsirkan (*interpreting*), memberikan contoh aplikatif (*exemplifying*), mengklasifikasikan (*classifying*), meringkas aturan (*summarizing*), menarik inferensi (*inferring*), memperbandingkan (*comparing*), serta menjelaskan (*explaining*). Deskripsi data hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan hasil-hasil pengumpulan data tentang jawaban responden atas angket yang diberikan kepada responden yang mengukur pemahaman penyelenggaraan negara oleh Sekretariat Dinas PUPR Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara terhadap penyusunan aturan tata ruang maka setelah data penelitian terkumpul dilakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan persentase menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 22.0 for windows, dari analisis data tersebut diperoleh skor terendah (minimum) 71, skor tertinggi (maksimum) 134, rerata (mean) 102,87, nilai tengah (median) 102, nilai yang sering muncul (mode) 102, standar deviasi (SD) 15,003. Adapun perhitungannya terlampir sebagai berikut:

Tabel Perhitungan Rentang

No.	Kategori	Rentang Skor	Keterangan
1	Sangat Tinggi	108-132	Dilihat dari jumlah total apabila berada di rentang 108-132, maka termasuk kategori sangat tinggi
2	Tinggi	83-107	Dilihat dari jumlah total apabila berada di rentang 83-107, maka termasuk kategori tinggi
3	Rendah	58-82	Dilihat dari jumlah total apabila berada di rentang 58-82, maka termasuk kategori rendah
4	Sangat Rendah	33-57	Dilihat dari jumlah total apabila berada di rentang 33-57, maka termasuk sangat rendah

Berdasarkan hasil tersebut terlihat pemahaman responden dalam penyelenggaraan negara terhadap penyusunan aturan tata ruang adalah 0 (0%), responden menyatakan sangat tinggi, 15 (45,45%), responden menyatakan tinggi, 17 (51,51%), responden menyatakan rendah, dan 1 (3,03%), responden menyatakan sangat rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran pemahaman responden dalam penyelenggaraan negara terhadap penyusunan aturan tata ruang berada dalam kategori setuju dengan rerata yang diperoleh 102,87 yang berada pada rentan skor $100 \leq x < 130$.

Menafsirkan (*Interpreting*)

No	Rentan Skor	Kategori	Skor	Frekuensi	Total
1	$x \geq 13$	Sangat Tinggi	4	0	0
2	$10 \leq x < 13$	Tinggi	3	12	36
3	$7 \leq x < 10$	Rendah	2	13	26
4	$7 \geq x$	Sangat Rendah	1	8	8
Jumlah				33	70

Memasuki pusat analisis yang telah digambarkan kerangka analisis sebelumnya, analisis ini akan merujuk pada tujuh indikator dalam mengukur pemahaman. Analisis pemahaman pertama yaitu penafsiran aturan (*interpreting*) memiliki fungsi dari pengukurannya. Dalam pengukuran *interpreting* ini digunakan untuk menganalisis kemampuan penyelenggara negara dalam menafsirkan aturan AMDAL sesuai dengan kebutuhan daerah Provinsi Sumatera Utara. Dari angket yang diisi oleh beberapa responden pada penelitian ini, data diperoleh skor batasan selang yang menunjukkan skor 4 yaitu sangat tinggi sebanyak 0, skor 3 yaitu tinggi sebanyak 12, skor 2 yaitu rendah sebanyak 13, dan skor 1 yaitu sangat rendah sebanyak 8.

Dari data yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menafsirkan (*interpreting*) di ruang lingkup penyelenggara ATR di Provinsi berada di tingkat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari total data rill menunjukkan adanya kondisi penafsiran yang masih rendah dengan total sebesar 70. Merujuk pada tabel perhitungan rentang, posisi rendah dilihat apabila nilai total berada pada rentang 58-82, dan nilai total yang diperoleh dari indikator *interpreting* berada di angka 70. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil pengukuran akan kemampuan menafsirkan berada di kategori rendah.

Aplikatif (*Exemplifying*)

No	Rentan Skor	Kategori	Skor	Frekuensi	Total
1	$x \geq 13$	Sangat Tinggi	4	14	56
2	$10 \leq x < 13$	Tinggi	3	12	36
3	$7 \leq x < 10$	Rendah	2	7	14
4	$7 \geq x$	Sangat Rendah	1	0	0
Jumlah			33	106	

Dalam analisis pemahaman kedua yaitu pemberian contoh aplikatif terhadap sebuah aturan (*exemplifying*). Biasanya, pengukuran ini digunakan untuk mengukur kemampuan penyelenggara negara dalam memberikan contoh aplikatif dari sebuah aturan yang berlaku di lingkungan pekerjaan. Selain itu, pengukuran ini juga diharapkan dapat mengukur kemampuan penyelenggara negara dalam memberikan contoh aplikatif dari sebuah aturan dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan contoh kasus di wilayah provinsi Sumatera Utara. Merujuk pada hasil data yang didapat, adapun data diperoleh skor 4 yaitu sangat tinggi dengan jumlah 14, skor 3 yaitu tinggi dengan jumlah 12, skor 2 yaitu rendah dengan jumlah 7 dan skor 1 yaitu sangat rendah dengan skor 0.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa pemahaman responden tentang penyelenggaraan negara dalam memberikan contoh aplikatif (*exemplifying*) berada di posisi tinggi. Hal ini ditunjukkan dari hasil data yang telah diperoleh dari total keseluruhan di angka 107. Angka 107 dengan kategori ditunjukkan merujuk pada hasil perhitungan rentang keseluruhan yang apabila nilai total berada pada kisaran angka 83-107. Sehingga, responden menunjukkan adanya kemampuan yang baik di penyelenggara ATR Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan contoh aplikatif dalam penjelasan peraturan yang ada. Maka dari itu, disimpulkan pada bagian kemampuan memberikan contoh aplikatif menjadi hal yang perlu ataupun ditingkatkan oleh lembaga pemerintah perencanaan tata ruang dan wilayah provinsi Sumatera Utara meski sudah berada di kategori tinggi.

Mengklasifikasikan (*Classifying*)

No	Rentan Skor	Kategori	Skor	Frekuensi	Total
1	$x \geq 13$	Sangat Tinggi	4	5	20
2	$10 \leq x < 13$	Tinggi	3	15	45
3	$7 \leq x < 10$	Rendah	2	10	20
4	$7 \geq x$	Sangat Rendah	1	3	3
Jumlah			33	88	

Analisis ke tiga yaitu mengukur pemahaman akan kemampuan mengklasifikasi aturan (*classifying*), pengukuran ini digunakan untuk menguji kemampuan penyelenggara negara dalam mengklasifikasikan aturan AMDAL. Dari angket yang disebarkan ke responden data diperoleh skor 4 yaitu kategori sangat tinggi sebanyak 5, skor 3 yaitu kategori tinggi sebanyak 15, skor 2 yaitu kategori rendah sebanyak 10, dan skor 1 yaitu kategori sangat rendah sebanyak 3. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa pemahaman responden tentang penyelenggaraan negara dalam mengklasifikasikan (*classifying*) menyatakan tinggi. Total keseluruhan yang berada di angka 88 dengan rentang keseluruhan penentuan nilai rentang yang telah ditetapkan yaitu kategori tinggi apabila berada di

angka antara 83-107. Maka dari itu, dapat disimpulkan kemampuan mengklasifikasikan (*classifying*) berada di kategori yang tinggi. Dari indikator ini, karena berada di kategori yang tinggi, maka dapat menjadi hal yang penting untuk dipertahankan oleh penyelenggara tata ruang di Provinsi Sumatera Utara.

Meringkas Aturan (*Summarizing*)

No	Rentan Skor	Kategori	Skor	Frekuensi	Total
1	$x \geq 13$	Sangat Tinggi	4	4	16
2	$10 \leq x < 13$	Tinggi	3	22	66
3	$7 \leq x < 10$	Rendah	2	7	14
4	$7 \geq x$	Sangat Rendah	1	0	0
Jumlah				33	96

Analisis pemahaman ke empat ialah kemampuan meringkas aturan (*Summarizing*), pengukuran ini digunakan untuk menguji kemampuan penyelenggara negara dalam menyimpulkan poin-poin dalam aturan AMDAL. Data yang telah diperoleh pada angket yang diberikan ke beberapa responden diantaranya skor 4 yaitu sangat tinggi sebanyak 4, skor 3 yaitu tinggi sebanyak 22, skor 2 yaitu rendah sebanyak 7, dan skor 1 yaitu sangat rendah sebanyak 0. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa pemahaman responden tentang penyelenggaraan negara dalam meringkas aturan (*summarizing*) responden menyatakan tinggi dengan perolehan total angka sebanyak 97. Angka tersebut dinyatakan dalam kategori tinggi karena dari hasil perhitungan rentang diperoleh nilai keseluruhan apabila berada di angka 83-107. Menariknya, pada bagian indikator *summarizing* ini menunjukkan hasil data responden menyatakan tingginya posisi penyelenggara pemerintah rencana tata ruang dalam meringkas aturan, hal ini sebenarnya menghadirkan ambiguitas tersendiri dari kata-kata "meringkas" itu sendiri, namun dalam hal ini justru menjadikan hadirnya kemudahan pada proses pelaksanaan pekerjaan di lembaga pemerintah rencana tata ruang itu sendiri. Sehingga, apabila pekerjaan menjadi mudah, maka lembaga penyelenggara perencanaan tata ruang dapat mengerjakan pekerjaan dengan kuantitas yang banyak.

Menarik Inferensi (*Inferring*)

No	Rentan Skor	Kategori	Skor	Frekuensi	Total
1	$x \geq 13$	Sangat Tinggi	4	8	32
2	$10 \leq x < 13$	Tinggi	3	17	51
3	$7 \leq x < 10$	Rendah	2	8	16
4	$7 \geq x$	Sangat Rendah	1	0	0
Jumlah				33	99

Analisis pemahaman ke lima ialah menarik inferensi aturan (*Inferring*), pengukuran ini digunakan untuk menguji kemampuan penyelenggara negara dalam menlarkan secara logis (Inferens) pada aturan AMDAL yang berlaku. Dari angket yang diisi oleh responden, data diperoleh skor 4 yaitu sangat tinggi sebanyak 8, skor 3 yaitu tinggi sebanyak 17, skor 2 yaitu rendah sebanyak 8, dan skor 1 yaitu sangat rendah sebanyak 0. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa pemahaman responden tentang penyelenggaraan negara dalam menarik inferensi (*inferring*) terhadap penyusunan tata ruang berada dalam kategori tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan diperolehnya total keseluruhan di angka 100 dan dilihat dari perhitungan rentang apabila berada di angka 83-107 menunjukkan kategori tinggi. Sehingga, ada kualitas tertentu yang menunjukkan kemampuan penyelenggara pemerintah dalam melihat aturan-aturan yang ada di lembaga penyelenggara rencana tata ruang yaitu kemampuan dalam menarik inferensi.

Memperbandingkan (*Comparing*)

No	Rentan Skor	Kategori	Skor	Frekuensi	Total
1	$x \geq 13$	Sangat Tinggi	4	14	56
2	$10 \leq x < 13$	Tinggi	3	12	36
3	$7 \leq x < 10$	Rendah	2	7	14
4	$7 \geq x$	Sangat Rendah	1	0	0
Jumlah				33	106

Analisis pemahaman ke enam adalah membandingkan dengan aturan lainnya (*comparing*), pengukuran ini digunakan untuk menguji kemampuan penyelenggara negara dalam membandingkan aturan AMDAL dengan aturan yang sejenis, antar negara, baik dengan aturan terdahulu. Dari angket yang disebar ke beberapa responden, diperoleh data dengan skor 4 yaitu sangat tinggi sebanyak 14, skor 3 yaitu tinggi sebanyak 12, skor 3 yaitu rendah sebanyak 7, dan skor 1 yaitu sangat rendah sebanyak 0. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa pemahaman responden tentang penyelenggaraan negara menunjukkan bahwa kemampuan memperbandingkan (*comparing*) terhadap penyusunan tata ruang berada dalam kategori tinggi dengan jumlah total sdi angka 106. Kategori tinggi tersebut ditunjukkan dari hasil perhitungan rentang secara keseluruhan apabila berada diantara angka 83-107. Masih sama seperti indikator sebelumnya, sampai pada indikator ke enam masih berada di kategori tinggi.

Menjelaskan (*Explaining*)

No	Rentan Skor	Kategori	Skor	Frekuensi	Total
1	$x \geq 13$	Sangat Tinggi	4	5	20
2	$10 \leq x < 13$	Tinggi	3	21	63
3	$7 \leq x < 10$	Rendah	2	3	6
4	$7 \geq x$	Sangat Rendah	1	4	4
Jumlah				33	93

Analisis pemahaman ke tujuh ialah menjelaskan aturan (*Explaining*), pengukuran ini digunakan untuk menguji kemampuan penyelenggara negara dalam menjelaskan aturan AMDAL. Dari hasil analisis data diperoleh skor 4 yaitu sangat tinggi sebanyak 5, skor 3 yaitu tinggi sebanyak 21, skor 2 yaitu rendah sebanyak 3, dan skor 1 yaitu rendah sebanyak 4. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa dalam pemahaman responden tentang penyelenggaraan negara dalam menjelaskan (*explaining*) menunjukkan frekuensi tertinggi berada pada jumlah total di angka 93 yaitu termasuk dalam kategori tinggi. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan penyelenggara ATR Provinsi Sumatera Utara berada di ukuran yang baik. Namun, pada indikator *explaining* ini penting untuk menjadi perhatian karena pada indikator ini memiliki kekuatannya tersendiri untuk dapat diaplikasikan oleh seluruh penyelenggara.

Dari penjelasan dan data yang dihasilkan dari angket di dua paragraph sebelumnya, indikator yang paling mudah dan paling diperlukan untuk menyimpulkan keseluruhan indikator analisis pengukuran pemahaman ialah *explaining*. Pada bagian indikator ini, kemampuan penyelenggara dalam menjelaskan peraturan-peraturan, perizinan, pekerjaan, serta hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana tata ruang baik ke pihak eksternal maupun pihak internal. Maka dari itu, diperlukan secara pasti bahwa penyelenggara benar memahami segala hal yang berkaitan dengan lembaga penyelenggaranya itu sendiri.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan evaluasi data dan hasil pengujian, mengarah pada pemahaman penyelenggara pemerintah di tata ruang Provinsi Sumatera Utara melalui tujuh indikator pendukung analisis. Penelitian ini mengukur pemahaman menggunakan indikator seperti penafsiran aturan (*interpreting*), yang memperoleh hasil pengukuran rendah. Sebaliknya, indikator



pemberian contoh aplikatif (exemplifying), kemampuan mengklasifikasi aturan (classifying), meringkas aturan (summarizing), menarik inferensi (inferring), membandingkan aturan (comparing), dan menjelaskan aturan (explaining) menunjukkan hasil pengukuran tinggi. Secara keseluruhan, hasil dari ketujuh indikator ini telah menjelaskan dan menjawab tujuan utama penelitian, menegaskan pemahaman dan kapasitas penyelenggara pemerintah dalam mengelola tata ruang di Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdina, M. F. (2019). Analisis Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Asahan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 294-306.
- Daulay, D. A., Silalahi, M., Sisca, S., & Dharma, E. (2019). Pengaruh Tata Letak Dan Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Pada Pt Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar. *Maker: Jurnal Manajemen*, 5(2), 25-35.
- Flannery, W., Healy, N., & Luna, M. (2018). Exclusion and non-participation in Marine Spatial Planning. *Marine Policy*, 88, 32-40.
- Heryana, A., & Unggul, U. E. (2018). Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif. *Universitas Esa Unggul*, 25, 15.
- Huang, W. J. (2019). The New Spatial Planning Act in Taiwan: A Messy Shift from Economic Development-Oriented Planning to Environmental Conservation-Oriented Planning?. *Planning practice & research*, 34(1), 120-130.
- Kusumaningrat, M. D., Subiyanto, S., & Yuwono, B. D. (2017). Analisis Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009 Dan 2017 (Studi kasus : Kabupaten Boyolali). *Jurnal Geodesi Undip*, 6(4), 443-452.
- Kusuma, R. E. (2014). "Pelaksanaan pendelegasian wewenang bupati kepada camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Perspektif*, 2(19), 125-136.
- Kusyuniadi, I. (2018). Policy implementation study on spatial planning for environmental conflict (study location: Rembang Regency). In *E3S Web of Conferences* (Vol. 31, p. 09015). EDP Sciences.
- Kyvelou, S. S., & Gourgiotis, A. (2019). Landscape as connecting link of nature and culture: spatial planning policy implications in Greece. *Urban Science*, 3(3), 81.
- Li, Y., Zhang, X., Zhao, X., Ma, S., Cao, H., & Cao, J. (2016). Assessing spatial vulnerability from rapid urbanization to inform coastal urban regional planning. *Ocean & Coastal Management*, 123, 53-65.
- Supriyono, S. (2018). Analisis Dampak Letusan Gunung Sinabung Kaitannya Dengan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Kapita Selektia Geografi*, 1(2), 149-155.
- Susanawati, L. D., Widiatmono, B. R., & Shandy, R. D. (2019). Analisis Neraca Lahan Terhadap Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Di Kabupaten Tuban. *Jurnal Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 5(2), 10-17.
- Tammi, I., Mustajärvi, K., & Rasinmäki, J. (2017). Integrating spatial valuation of ecosystem services into regional planning and development. *Ecosystem Services*, 26, 329-344.
- Tarigan, M. U. (2004). Analisis Dampak Proyek PLTA Asahan Terhadap Lingkungan Hidup Di Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara (Sumatera Utara).
- Tewdwr-Jones, M., Bishop, K., & Wilkinson, D. (2000). 'Euroscpticism', political agendas and spatial planning: British national and regional planning policy in uncertain times. *European Planning Studies*, 8(5), 651-668.
- Tulla, S. d. (2014). Tata Ruang Daerah Catalunya dan Kota Barcelona. *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*.
- Wibisono, E. S. (2015, Februari 26). *HAKI: pembangunan Sumut banyak langgar tata ruang*. Retrieved from Antara News: <https://www.antaraneews.com/berita/482049/haki-pembangunan-sumut-banyak-langgar-tata-ruang>
- Wilkinson, K. B.-J. (2000). From Spatial to Local: The Impact of the European Union on Local Authority Planning in the UK. *Journal of Environmental Planning and Management*, 3(43), 3-309.

